**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**
2. **Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab,telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ke gagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan,dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 tahun 2018 tentang Tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Kedu adalah Melaksanakan Pemerintahan Daerah di Wilayah.

Tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan Pemerintahan Daerah di wilayahnya.

Adapun fungsi Pemerintah Kecamatan Kedu terdiri dari :

1. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
2. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum;
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
4. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
5. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan Tupoksi, Pemerintahan Kecamatan Kedu selain melaksanakan Program/Kegiatan yang tertuang dan dijabarkan dalam APBD 2020, Kecamatan Kedu juga melaksanakan tugas-tugas koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Instansi terkait yang berada di Wilayah Kecamatan Kedu.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Kecamatan Kedu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
2. Penyerlenggaraan tugas – tugas Pemerintahan Umum;
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
4. Penggorganisasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan Kecamatan;
5. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

* Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi

Tugas camat :

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Fungsi Camat :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentramanan dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh perundang – undangan; dan
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

* Tugas Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum, meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan
2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemerintahan

* Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

* Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

* Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :

a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

* Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi :

a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

* Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi :

a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;

d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

* Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan adminsitrasi desa dan/atau kelurahan;

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;

e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;

f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

* Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :

a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

a. Perijinan;

b. Rekomendasi;

c. Koordinasi;

d. Pembinaan;

e. Pengawasan;

f. Fasilitasi;

g. Penetapan;

h. Penyelenggaraan;

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

* Sekretaris camat

Sekretariat camat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

Fungsi Sekretaris sebagai berikut:

1. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
6. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

* Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan kecamatan penyusunan rencana anggaran,menyusun LKJIP,LPPD, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.

Tugas Jabatan SubBag perencanaan dan Keuangan :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bag Perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagian perencanaan dan keuangan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian perencanaan dan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian perencanaan dan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang beraku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyusun konsep RKA dan DPA serta perubahan di lingkup su Bagian;
6. Menyusun konsep rencana strategis( Renstra ), rencana kerja ( renja),penetapan kinerja (PK), laporan kinerja, dan laporan pertanggungjawan kecamatan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
7. Melaksanakan fasilitasi kebijakan teknis penyusunan anggaran ( RKA dan DPA ) di lingkungan Kecamatan termasuk fasilitasi perubahan anggaran agar kegiatan berjalan lancar;
8. Melaksanakan pengelolaan anggaran kecamatan dengan melaksanakan pengambilan dan pengeluaran keuangan kecamatan sesuai pagu yang ditentukan;
9. Melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan dengan sistem akutansi yang lazim dengan menerapkan sistem menajemen keuangan daerah;
10. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menejemen keuangan dalam perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, akutansi dan pembukuan;
11. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menejemen keuangan dalam rangka verifikasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan bagian perencanaan dan keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
13. Melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan bagian perencanaan dan keuangan sesuai presedur dan peraturan yang berlaku sebagai akutanbilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

* Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian kecamatan.

1. Merencanakan kegiatan sekertariatan berdasarkan rencana oprasional bagian umum dan kepegawian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawian sesui dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan kegiatan pengolahan administrasidan menejemen kerumahtanggaan meliputi pengelolahan aset , penyiapan sarana dan prasarana kantor penyediaan bahan dan sarana prasarana rapat-rapat,dan perawatan gedung dan sarana rumah tangga kecamatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menejemen kepegawian dengan melakukan pelayanan dan pengusulan serta proses kenaikan pangkat ,gaji berkala,disiplin pegawai ,kehadiran pegawai , penilaian kinerja,pelayanan cuti pegawai,serta administrasi lainnya di lingkungan kecamatan .
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menejemen ketatausahaan dengan melakukan urusan surat menyurat,kearsipan dan perpustakaan.
8. Melaksanakan fasilitasi penyusunan standar pelayanan,standar oprasional,prosedur,analisis jabatan dan standar kopentensi di lingkungan kecamatan.
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menejemen urusan hukum kehumasan dan keorganisasian serta ketatalaksanaan sebagai bahan pendukung kebijakan
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian dengan cara mengindentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

* Tugas Seksi Tata Pemerintahanadalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa, sedangkan fungsinya adalah :

1. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan seksi pemerintahan;
2. Fasilitasi dan pengoordinasian tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
3. Fasilitasi dan pengoordinasian aparatur pemerinatahan desa dan / atau kelurahan;
4. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
5. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
7. Evaluasi rancangan pembangunan jangka menegah desa,rencana kerja pembangunan desa,anggaran pembangunan dan belanja desa,pungutan desa,struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat, sesuai dengan fungsinya.

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

* Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian kecamatan, produksi dan distribusi bahan makanan/kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :

1. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan seksi pemberdayaan masayarakat desa;
2. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa;
3. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
4. Fasilitasi dan pengoordinasian kelembagaan desa;
5. Fasilitasi dan pengoordinasiaan penyelenggaraan ,pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
6. Fasilitasi dan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
7. Penggordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat, sesuai dengan fungsinya.

* Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja, sedangkan fungsinya adalah :

1. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
4. Penaganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
5. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
6. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
7. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
8. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
9. Pemberian rekomendasi dan/atau perijinan tertentu;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat, sesuai dengan fungsinya.

* Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah mengoordinasikan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :

1. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
3. Fasilitasi dan penggordinasian kegiatan keluarga berencana perlindungan perempuan dan anak;
4. Penyelenggaraan kegiatan penaganan rumah miskin;
5. Penangulangan masalah sosial;
6. Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kepemudaan,oleh raga,seni budaya,keagamaa,kesehatan,pendidikan,serta kepramukaan dan peranan wanita;
7. Pembinaan dan pengembangan ketagakerjaan;dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat, sesuai dengan fungsinya
9. **Susunan Organisasi**

Sumber Daya Manusia Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | | JUMLAH PEGAWAI | KET |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Kondisi pegawai berdasarkan: | | | | |
| 1 | KualisasiPendidikan | |  |  |
|  | a. | SD |  |  |
|  | b. | SMP |  |  |
|  | c. | SMA | 8 |  |
|  | d. | SarjanaMuda (D-III) | 0 |  |
|  | e. | S-1 dan D-IV | 5 |  |
|  | f. | S-2 | 2 |  |
| **Jumlah** | | | **15** |  |
| 2 | Pangkat/Golongan | |  |  |
|  | a | Gol I |  |  |
|  | b | Gol II | 5 |  |
|  | c | Gol III | 8 |  |
|  | d | Gol IV | 2 |  |
| **Jumlah** | | | **15** |  |
| 3 | Jabatan | |  |  |
|  | a | Eselon II |  |  |
|  | b | Eselon III | 2 |  |
|  | c | Eselon IV | 5 |  |
|  | d | Eselon V | - |  |
|  | e | JabatanFungsional Khusus | - |  |
|  | f | JabatanFungsionalUmum | 8 |  |
| **Jumlah** | | | **15** |  |

Dari data table di atas rata-rata pegawai di Kecamatan Kedu merupakan lulusan (8 orang SMA/0 orang D3/,5 orang S1/,2 orang S2) dengan pangkat golongan (5 orang gol II/8 orang gol III/2 orang gol IV).

Struktur Organisasi Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan kedu

Kabupaten Temanggung

Camat

Sekretariat Kecamatan

Subbag Umum dan Kepegawaian

Subbag Perencanaan

Keuangan

Seksi Trantibum

Seksi

PMD

Seksi

Tapem

Seksi Kesmas

1. **Isu Strategis Kecamatan Kedu**

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah,Kecamatan Kedu secara umum memiliki Fungsi strategis .

Adapun permasalahan utama (strategic issued) Kecamatan Kedu yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah Belum optimalnya pelayanan public ;menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastrukur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien dalam menjawab isu-isu strategis daerah. Penentuan strategi dan arah kebijakan dilakukan antara lain dengan melihat capaian Rencana kerja sebelumnya, potensi yang dimiliki Kecamatan Kedu, dan dengan mengingat kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki Kecamatan Kedu.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kecamatan Kedu untuk mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;

2) Peningkatan kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan;

3) Peningkatan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;

4) Peningkatan kualitas iman dan taqwa;

5) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat .

6) Peningkatan Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

7) Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup;

8) Peningkatan lingkungan sehat.

9) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;

10) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;

11) Peningkatan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;

12) Peningkatan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur;

13) Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

14) Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun permasalahan utama (strategic issued) Kecamatan Kedu yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan;
3. Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
5. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
6. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastrukur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
7. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
8. Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
9. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
10. Belum optimalnya pemerataan pembangunan insfrastruktur daerah.

**DATA POKOK**

**KECAMATAN KEDU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **JENIS DATA** | **KODE** | **DEFINISI** | **RUMUS** | **TABEL** | **ANALISIS** | **DATA DUKUNG** |
|  | Indek kepuasan masyarakat ( IKM ) | IP | V | V | V | V | V |
|  | Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | IP | V | V | V | V | V |
|  | Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan | IP | V | V | V | V | V |
|  | Persentase realisasi penerimaan PBB | IP | V | V | V | V | V |
|  | Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset | IP | V | V | V | V | V |
|  | Persentase laporan LPPD tepat waktu | IP | V | V | V | V | V |
|  | Persentasi kegiatan yang selesai tepat waktu | IP | V | V | V | V | V |
|  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | IP | V | V | V | V | V |
|  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | IP | V | V | V | V | V |
|  | Persentase rumah tidak layak huni | IP | V | V | V | V | V |
|  | Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik | IP | V | V | V | V | V |
|  | Persentase penanganan laporan kejadian | IP | V | V | V | V | V |
|  | Angka kriminalitas kecamatan | IP | V | V | V | V | V |
|  | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana | IP | V | V | V | V | V |

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Beradasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Indek kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur pennyelenggara pelayanan publik.

Table.1.1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,

Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nilai Persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
| 1 | 1, 00 – 2, 5996 | 25 – 64,99 | D | Tidak Baik |
| 2 | 2, 60 – 3, 064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang Baik |
| 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat Baik |

Sumber Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Tabel .1.2

# Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kedu

# Tahun 2015-2020 TW IV

| **No.** | **TAHUN** | **NILAI** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2015 | 72 |
| 2 | 2016 | 73 |
| 3 | 2017 | 75 |
| 4 | 2018 | 80 |
| 5 | 2019 | 81 |
| 6 | 2020\* | 83 |

*Sumber : dari bagian ortala setda Temanggung*

Berdasarkan nilai diatas , nilai indeks kepuasaan masyarakat Kecamatan kedu dari tahun 2015 s.d 2020 mengalami kenaikan dari 72 mendai 83 dengan kategori B ( Baik ).

Tabel.1.3

Rata-rata persepsi per unsur/ruang lingkup SKM

Pelayanan kartu keluarga pada Kantor Kecamatan Kedu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Unsur/ruang lingkup | Nilai | Kategori |
| 1 | Persyaratan | 3,82 | Sangat baik |
| 2 | Sistem Mekanisme dan prosedur | 3,77 | Sangat baik |
| 3 | Waktupelayanan | 3,88 | Sangat baik |
| 4 | Biaya/tarif | 3,82 | Sangat baik |
| 5 | Produk spesifikai jenis pelayanan | 3,78 | Sangat baik |
| 6 | Kompetensi pelaksana | 3,82 | Sangat baik |
| 7 | perilaku Pelaksana | 3,85 | Sangat baik |
| 8 | Penanganan, pengaduan | 3,83 | Sangat baik |
| 9 | Sarana dan prasarana | 3,76 | Sangat baik |
|  | Nilai SKM | 3,08 | Baik |
|  | KONVERSI NILAI SKM | 83,00 | Baik |

Tabel diatas mengambarkan bahwa :

Nilai rata-rata persepsi dari sejumlah responden terhadap unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah :

* “ persyaratan” pelayanan adalah 3,82 dengan kategaori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “ Persyaratan dengan jenis pelayanan sangat sesuai
* “ Prosedur” pelayanan adalah 3,77 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “prosedur pelayanan sangat mudah”
* “ Waktu” pelayanan adalah 3,88 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “ kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan sangat cepat”
* “ biaya/tarif” pelayanan adalah 3,82 dengan kategori sangat baik yang diasusimkan bahwa responden menyatakan “ biaya tariff pelayanan gratis”
* “Produk spesifikasi jenis pelayanan” adalah 3,78 dengan kategori sangat baik yang diasusimkan bahwa responden menyatakan “ keseuaian produk pelayanan yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang dibwrikan sangat sesuai.
* “ Kompetensi pelaksana” palayanan adalah 3,82 dengan kategori sangat baik yang diasusimkan bahwa responden menyatakan “kopetensi petugas dalam pelayanan sangat kompeten”
* “ Perilaku pelaksana” pelayanan adalah 3,85 dengan kategori sangat baik yang diasusimkan bahwa responden menyatakan “perilaku petugas dalam pelayanan sangat sopan dan sangat ramah”
* “ Penanganan pengaduan, saran dan masukan” adalah 3,83 dengan kategori sangat baik yang diasusimkan bahwa responden menyatakan “ penanganan pengaduan dikelola dengan baik”
* “ Sarana dan Prasarana” pelayanan adalah 3,76 dengan kategori sangat baik yang diasusimkan bahwa responden menyatakan “ kualitas sarana dan prasarana sangan baik.

Tingkat kepuasan tertinggi pada pelayanan ini adalah unsur “ biaya / tarif”, sedangkan kepuasan terendah ada pada unsur “ Sarana dan prasarana”.

Total rata-rata persepsi seluruh unsur pelayanan / ruang lingkup SKM adalah sebesar 83,00 dengan ketegori baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “ Puas” terhadap pelayanan kartu keluarga.

Kegiatan survei kepuasan masyarakat secara mandiri ini dilakukan pada pelayanan kartu keluarga yang ada pada kantor Kecamatan Kedu Kabupaten temanggung.

Meskipun belm dapat pengambarkan keseluruhan kualitas pelayanan, namun setidaknya analisis hasil capaian SKM yang disajikan dalam laporan ini diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi unit pelayanan dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan.

Hasil SKM ini merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor kecamatan kedu Kabupaten Temanggung sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar – benar mecapai sasaran yang diiginkan masyarakat pengguna pelayanan publik.

Persepsi dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pada Kantor Kecamatan Kedu secara umum dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 1.4

Persepsi penilaian masyarakat/pelangan terhadap kualitas jenis pelayanan kartu keluarga pada kantor Kecamatan Kedu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Pelayanan | Nilai | Kategori |
| 1 | Kartu keluarga | 83,00 | Baik |

Kesimpulan secara umum yang dapat diambil dari kegiatan SKM secara mandiri ini antara lain :

1. Dari hasil SKM secara mandiri ini, secara umum masyarakat/ responden telah memberikan penilaian rata-rata “ Baik” terhadap jenis pelayanan tertentu yang disurvei.
2. Sebagai responden tidak memberikan penilaian atau pernyatan terhadap pertanyaan yang ada dalam kuisioner .

Hal ini disebabkan bahasa atau kalimat pertanyaan dalam kuisioner yang digunakan sulit dipahami terutama oleh responden dengan latar belakang pendidikan relative kurang memadai.

1. **Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa.**

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

1. tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
2. tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
3. melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

# Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

# di Kecamatan Kedu Tahun 2015-2020 s/d Triwulan IV

| **No** | **Uraian** | **Tahun** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Kedu (jiwa) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kedu (jiwa) | 212 | 201 | 205 | 205 | 217 | 219 |
| 3 | Persentase (%) | 0,49 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber : Kecamatan Kedu Tahun 2020*

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kedu semakin meningkat/menurun karena adanya pembinaan di desa - desa, pelanggaran perangkat desa godang wayang karena pelanggaran absensi ,dana PBB.

Tabel 2.2

Jumlah pelanggaran disiplin

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kedu | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Danurejo | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Salamsari | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Candimulyo | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Mojotengah | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Karangtejo | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kutoanyar | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mergowati | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ngadimulyo | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kundisari | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bojonegoro | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Gondangwayang | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Tegalsari | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bandungggede | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Persentase Kepemilikan KTP-el di KecamatanKedu**

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kedu adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kedu dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kedu. Presentase kepemilikan KTP- el dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

# Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kedu

# Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| **No** | **Uraian** |  | **Tahun** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kedu (jiwa) | 43.608 | 44.229 | 44.523 | 45.165 | 45.237 | 43.913 |
| 2 | Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kedu (jiwa) | 45.029 | 46.011 | 46.515 | 47.627 | 47.979 | 44.174 |
| 3 | Persentase (%) | 96,8 | 96,1 | 95,7 | 94,8 | 94,3 | 99,4 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020*

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015 – 2020 cenderung meningkat, karena ada permasalahan teknis adanya pandemi Covid-19,untuk perekaman KTP yang sudah memasuki usia 17 tahun dilaksanakan di kantor Dindukcapil Kabupaten Temanggung.disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar dari pada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP-el Ke Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo.

Tabel .3.2 - Triwulan IV

Penduduk Wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el di Kecamatan Kedu tahun 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | Jumlah Wajib KTP | Jumlah Kepemilikan KTP | Wajib KTP yang belum memiliki KTP el | Ket |
| 1 | Kedu | 4.155 | 4.133 | 22 |  |
| 2 | Danurejo | 2.378 | 2.369 | 9 |  |
| 3 | Salamsari | 1.359 | 1.350 | 9 |  |
| 4 | Candimulyo | 3.758 | 3.737 | 21 |  |
| 5 | Mojotengah | 3.316 | 3.305 | 11 |  |
| 6 | Karangtejo | 2.204 | 2.194 | 10 |  |
| 7 | Kutoanyar | 3.835 | 3.809 | 26 |  |
| 8 | Mergowati | 3.740 | 3.718 | 22 |  |
| 9 | Ngadimulyo | 4.435 | 4.389 | 46 |  |
| 10 | Kundisari | 3.835 | 3.809 | 26 |  |
| 11 | Bojonegoro | 2.811 | 2.792 | 19 |  |
| 12 | Gondangwayang | 3.388 | 3.368 | 20 |  |
| 13 | Tegalsari | 2.686 | 2.668 | 18 |  |
| 14 | Bandungggede | 3.518 | 3.504 | 14 |  |
| JUMLAH | | 44.174 | 43.913 | 261 |  |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2020*

1. **Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB )merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel .4.1

# Persentase realisasi penerimaan PBB

# di Kecamatan Kedu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| **No** | **Uraian** |  | **Tahun** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kedu | 1.285.210.635 | 741.461.223 | 748.913.785 | 737.992.220 | 734.289.138 | 749.188.200 |
| 2 | Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kedu | 1.338.761.079 | 750.171.259 | 753.470.609 | 753.049.993 | 754.483.519 | 749.188.200 |
| 3 | Persentase (%) | 98,46 | 95,99 | 98,83 | 97,57 | 97,32 | 100 |

*Sumber : Kecamatan Kedu Tahun 2020*

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kedu cenderung fluktuatif , karena ada wajib pajak yang bertempat tinggal di luar daerah provinsi sehingga dalam penagihan mengalami kesulitan.

Tabel 4.2

Data persentase dan realisasi penerimaan PBB tahun 2020

s.d triwulan IV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | JUMLAH KETETAPAN (Rp) | REALISASI(Rp.) | Presentase  % |
| 1 | Kedu | 99.205.868 | 99.205.868 | 100 |
| 2 | Danurejo | 30.262.694 | 30.262.694 | 100 |
| 3 | Salamsari | 41.581.071 | 41.581.071 | 100 |
| 4 | Candimulyo | 50.840.970 | 50.840.970 | 100 |
| 5 | Mojotengah | 72.845.096 | 72.845.096 | 100 |
| 6 | Karangtejo | 35.678.628 | 35.678.628 | 100 |
| 7 | Kutoanyar | 28.675.428 | 28.675.428 | 100 |
| 8 | Mergowati | 59.517.133 | 59.517.133 | 100 |
| 9 | Ngadimulyo | 39.967.121 | 39.967.121 | 100 |
| 10 | Kundisari | 50.022.089 | 50.022.089 | 100 |
| 11 | Bojonegoro | 57.467.077 | 57.467.077 | 100 |
| 12 | Gondangwang | 63.336.315 | 63.336.315 | 100 |
| 13 | Tegalsari | 53.599.028 | 53.599.028 | 100 |
| 14 | Bandungggede | 69.258.405 | 69.258.405 | 100 |
|  | JUMLAH | 749.188.200 | 749.188.200 | 100 |

1. **Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Asetadalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan aset diKecamatan Kedu Tahun 2015 sampai 2020

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

# Tabel 5.1

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

di Kecamatan Kedu Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | Jumlah Desa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Kecamatan Kedu Temanggung, 2020*

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 100%.

Tabel 5.2

Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset

Di Kecamatan Kedu Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

| NO | DESA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kedu | V | V | V | V | V | V |
| 2 | Danurejo | V | V | V | V | V | V |
| 3 | Salamsari | V | V | V | V | V | V |
| 4 | Candimulyo | V | V | V | V | V | V |
| 5 | Mojotengah | V | V | V | V | V | V |
| 6 | Karangtejo | V | V | V | V | V | V |
| 7 | Kutoanyar | V | V | V | V | V | V |
| 8 | Mergowati | V | V | V | V | V | V |
| 9 | Ngadimulyo | V | V | V | V | V | V |
| 10 | Kundisari | V | V | V | V | V | V |
| 11 | Bojonegoro | V | V | V | V | V | V |
| 12 | Gondangwayang | V | V | V | V | V | V |
| 13 | Tegalsari | V | V | V | V | V | V |
| 14 | Bandungggede | V | V | V | V | V | V |

1. **Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kedu Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

# Tabel 6.1

Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu

di Kecamatan Kedu Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | Jumlah desa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Persentase (%) | 64,2 | 71,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Berdasarkan *sumber: Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, 2020*

berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 mengalami kenaikan, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban meningkat.

Tabel 2.11

Daftar desa yg menyelesaikan LPPD kondisi tahun 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | Tanggal Pengesahan di tahun 2019 | Tanggal Pengesahan di tahun 2020 |
| 1 | Kedu | 31-12-2019 |  |
| 2 | Danurejo | 30-12-2019 |  |
| 3 | Salamsari | 30-12-2019 |  |
| 4 | Candimulyo | 31-12-2019 |  |
| 5 | Mojotengah | 31-12-2019 |  |
| 6 | Karangtejo | 31-12-2019 |  |
| 7 | Kutoanyar | 16-01-2020 |  |
| 8 | Mergowati | 05-01-2020 |  |
| 9 | Ngadimulyo | 22-01-2020 |  |
| 10 | Kundisari | 10-01-2020 |  |
| 11 | Bojonegoro | 31-12-2019 |  |
| 12 | Gondangwayang | 15-02-2020 |  |
| 13 | Tegalsari | 01-03-2020 |  |
| 14 | Bandungggede | 31-12-2019 |  |

1. **Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu**

Pelaksanaan Kegiatan dan pengadaan Pemerintahan Desa yang meliputi kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu, persentase kegiatan selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu di bagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Table.2.12

Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Di Kecamatan Kedu tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan III

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 2 | Jumlah desa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Persentase desa yg menyelesaikan kegiatan tepat waktu | 71,4 | 78,5 | 85,7 | 92,8 | 100.0 | 100 |

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung meningkat karena Perangkat Desa sudah menyadari akan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu.

1. **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kedu Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 8.1**

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

di Kecamatan Kedu Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan III

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | 9 | 10 | 11 | 14 | 0 | 14 |
| 2 | Jumlah desa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Persentase | 64,2 | 71,4 | 78,5 | 100 | 0 | 100 |

*Sumber : Kecamatan kedu triwulan III thm 2020*

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung meningkat karena Perangkat Desa sudah menyadari akan pentingnya sebuah perencanaan. Sedangkan desa yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan RKP-Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 8.2

Daftar desa yg menyelesaikan RKP kondisi tahun 2020

s.d Triwulan IV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | Nomor | Tanggal | keterangan |
| 1 | Kedu | 7 Tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |
| 2 | Danurejo | 8 tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |
| 3 | Salamsari | 12 tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |
| 4 | Candimulyo | 7 Tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |
| 5 | Mojotengah | 8 tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |
| 6 | Karangtejo | 8 tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |
| 7 | Kutoanyar | 8 tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |
| 8 | Mergowati | 8 tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | Nomor | tanggal | keterangan |
| 9 | Ngadimulyo | 8 tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |
| 10 | Kundisari | 8 tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |
| 11 | Bojonegoro | 8 tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |
| 12 | Gondangwayang | 8 tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |
| 13 | Tegalsari | 8 tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |
| 14 | Bandungggede | 8 tahun 2020 | 30 Oktober 2020 | tepat waktu |

1. **Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu.**

# Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh penerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kedu Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

# Tabel 9.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

di Kecamatan Kedu Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan III

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | 8 | 9 | 10 | 13 | 7 | 14 |
| 2 | Jumlah desa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Persentase | 57,1 | 64,2 | 71,4 | 92,8 | 50 | 100 |

*Sumber : Kecamatan Kedu 2020*

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan 50% sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung menurun karena dengan adanya tambahan kegiatan, Bimtek dan peran pendamping desa yang membimbing terus menerus. Sedangkan desa yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan APB-Desa adalah :

Desa Kedu, Danurejo, Mojotengah, Karangtejo,Kutoanyar, Ngadimulyo dan desa Bojonergoro.

Tabel 9.2

Tabel 9.2

Daftar APB-Des tahun 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Desa | Nomor | Tanggal | Keterangan |
| 1 | Kedu | 11 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | tepat waktu |
| 2 | Danurejo | 10 tahun 2020 | 30 Desember 2020 | tepat waktu |
| 3 | Salamsari | 14 tahun 2020 | 30 Desember 2020 | tepat waktu |
| 4 | Candimulyo | 11 Tahun 2020 | 30 Desember 2020 | tepat waktu |
| 5 | Mojotengah | 14 tahun 2020 | 30 Desember 2020 | tepat waktu |
| 6 | Karangtejo | 10 tahun 2020 | 30 Desember 2020 | tepat waktu |
| 7 | Kutoanyar | 9 tahun 2020 | 31 Desember 2020 | tepat waktu |
| 8 | Mergowati | 11 tahun 2020 | 30 Desember 2020 | tepat waktu |
| 9 | Ngadimulyo | 11 tahun 2020 | 30 Desember 2020 | tepat waktu |
| 10 | Kundisari | 8 tahun 2020 | 30 Desember 2020 | tepat waktu |
| 11 | Bojonegoro | 10 ahun 2020 | 30 Desember 2020 | tepat waktu |
| 12 | Gondangwayang | 10 tahun 2020 | 12 Desember 2020 | tepat waktu |
| 13 | Tegalsari | 10 tahun 2020 | 31 Desember 2020 | tepat waktu |
| 14 | Bandungggede | 16 tahun 2020 | 30 Desember 2020 | tepat waktu |
|  | |  |  |  |

1. **Persentase rumah tidak layak huni**

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10.1

Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Kecamatan Kedu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Uraian | Tahun | | | | | |
| 2015  2015 | 2016  2016 | 2017  2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah rumah tidak layak huni | n.a | 1115 | 1115 | 651 | 591 | 481 |
| 2. | Jumlah yang ditangani | n.a | 0 | 464 | 60 | 110 | 54 |
| 3 | Sisa RTLH |  | 1115 | 651 | 591 | 481 | 427 |
| 4. | Jumlah rumah tinggal | 0 | 13.901 | 14.067 | 14.148 | 15.192 | 19.024 |
| 5. | Persentase | 0 | 0 | 41,61 | 9,21 | 43,65 | 11,22 |

*Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung naik. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Kedu pada Tahun 2015 sampai akhir 2020 menurun dari 1.376 unit menjadi 510 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 866 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

1. **Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik**

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

1. Masih layak untuk digunakan
2. 80% kondisi bangunan secara umum baik
3. Ada toilet
4. Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

# Tabel 11.1

# Persentase rumah ibadah kondisi baik

# Kecamatan Kedu, Tahun 2015-2020 s.d Triwulan III

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N No** | **Uraian** |  | **Tahun** | | | | | |
| **2015** | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  | Jumlah rumah ibadah kondisi baik |  | |  |  |  | 162 | 226 |
|  | - Islam | 145 | | 159 | 160 | 160 | 160 | 240 |
|  | - Kristen | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Katholik | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Hindu |  | |  |  | - | - | - |
|  | - Budha |  | |  |  | - | - | - |
|  | - Konghuchu |  | |  |  | - | - | - |
|  | Jumlah rumah ibadah | 159 | | 175 | 175 | 176 | 176 | 242 |
|  | % rumah ibadah kondisi baik | 92,4 | | 92,0 | 92,5 | 92,05 | 92.05 | 93,69 |

*Sumber : Kecamatan Kedu 2020*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik sejak tahun 2015 – 2020 masih dalam kondisi baik dan terawat.

Tabel 11.2

Tempat Ibadah di Kecamatan Kedu

Tahun 2020 Triwulan III

| NO | DESA | MASJID | MUSOLA | GEREJA/CAPEL | WIHARA | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kedu | 13 | 11 | 1 | - | Baik |
| 2 | Danurejo | 7 | 2 | - | - | Baik |
| 3 | Salamsari | 6 | 2 | - | - | Baik |
| 4 | Candimulyo | 13 | 8 | 1 | - | Mushola rusak 2 |
| 5 | Mojotengah | 13 | 12 | - | - | Baik |
| 6 | Karangtejo | 8 | 5 | - | - | Masjid rusak 1 |
| 7 | Kutoanyar | 4 | 11 | - | - | Mushola rusak 1 |
| 8 | Mergowati | 13 | 10 | - | - | Baik |
| 9 | Ngadimulyo | 8 | 12 | - | - | Masjid rusak 1,mushola rusak 4 |
| 10 | Kundisari | 8 | 7 |  |  | mushola rusak 1 |
| 11 | Bojonegoro | 4 | 8 |  |  | Mushola rusak 3 |
| 12 | Gondangwayang | 7 | 11 | - | - | Baik |
| 13 | Tegalsari | 9 | 7 |  |  | Masjid rusak 1 |
| 14 | Bandungggede | 10 | 4 | - | - | Masjid rusak 1,mushola rusak 1 |
| JUMLAH | | 126 | 114 | 2 |  | 16 rusak |

Tabel 11.3

Data Rumah ibadah kondisi rusak

Kecamatan Kedu s.d Triwulan III

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama tempat ibadah | Lokasi desa |
| 1 | Masjid sijambe | Desa Danurejo Gang 5 |
| 2 | Masjid Darul Magfiroh | Kedungwuluh Candimulyo |
| 3 | Masjid Baitul mustaqim | Dumpil Candimulyo |
| 4 | Masjid baitul makmur | Pakisan candimulyo |
| 5 | Mushola | Desa Ngadimulyo |
| 6 | Mushola | Desa Ngadimulyo |
| 7 | Mushola | Desa Ngadimulyo |
| 8 | Mushola | Desa Ngadimulyo |
| 9 | Masjid Barokah | Ngadidono Ngadimulyo |
| 10 | Masjid Nurul huda | Desa Ngadimulyo |
| 11 | Mushola Miftahul janah | Bojonegoro |
| 12 | Mushola Janatul Ma’wa | Bojonegoro |
| 13 | Masjid Al Mubarok | Diwek Bojonegoro |
| 14 | Masjid Baiturochman | Bringin Tegalsari |
| 15 | Masjid Al- ridwan | Bendosari Bandunggede |
| 16 | Mushola Baitulmuti’in | Kabunan Bandunggede |
|  |  |  |

1. **Persentase Penanganan Laporan Kejadian**

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kedu Tahun 2015 sampai 2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

# Tabel 12.1

Persentase Penanganan Laporan Kejadian

di Kecamatan Kedu Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah laporan kejadian yang ditindak lanjuti | 1 | 1 | 6 | 11 | 9 | 4 |
| 2 | Jumlah laporan kejadian | 1 | 1 | 6 | 11 | 9 | 4 |
| 3 | Persentase(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Kecamatan Kedu Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 flukfuatif, tahun 2020 kajadian kebakaran hutan di desa kahuripan, kebakaran rumah karena konsleting listrik di desa Mojotengah, tanah longsor pingir sungai di desa Kutoanyar.

Tabel 12.2

Laporan Kejadian

Di Kecamatan Kedu Tahun 2015 – tahun 2020 Triwulan IV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kedu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Danurejo | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Salamsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Candimulyo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Mojotengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Karangtejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kutoanyar | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Mergowati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ngadimulyo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kundisari | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Bojonegoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gondangwayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tegalsari | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Bandungggede | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

1. **Angka Kriminalitas Kecamatan**

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang.Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kedu dari tahun 2015 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

# Tabel 13.1

# Angka Kriminalitas Kecamatan Kedu

# Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| **No** | **Jenis Kriminal** | **Tahun** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | Jumlah kasus Narkoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Jumlah kasus Pembunuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jumlah kejahatan Seksual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jumlah kasus Penganiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jumlah kasus Pencurian | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 6. | Jumlah kasus Penipuan |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Jumlah kasus Pemalsuan uang |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Total Jumlah Tindak Kriminal | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 9. | Jumlah Penduduk | 59.899 | 61.171 | 61.829 | 63.004 | 63.004 | 63.004 |
| 10 | Angka Kriminalitas | 0,002 | 0.016 | 0,032 | 0,014 | 0 | 0 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan kedu meningkat ,di desa bandunggede gantung diri, di desa Kundisari Gantung diri, Pencurian di desa Kedu, pemalsuan uang didesa Bandungggede, pencurian desa Bandunggede, Pencurian beras Raskin di balai desa Bojonegoro sampai triwulan II tahun 2020 belum ada laporan criminal di Kecamatan Kedu.

Tabel 13.2

Daftar kasus criminal Kecamatan Kedu th 2015-2020 s.d Triwulan IV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kedu | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Danurejo | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Salamsari | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Candimulyo | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mojotengah | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Karangtejo | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kutoanyar | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mergowati | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ngadimulyo | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kundisari | - | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Bojonegoro | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 12 | Gondangwang | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Tegalsari | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bandungggede | - | - | - | 1 | - | - |
| JUMLAH | | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |

1. **Persentase desa/kelurahan tangguh bencana**

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yangmengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyakarat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Desa rawan bencana di Kecamatan Kedu meliputi 9 desa yaitu desa Kundisari, Salamsari , Mergowati, Kutoanyar, Kedu, Tegalsari, Bojonegoro, Candimulyo dan Danurejo.

Desa tangguh bencana didefinisikan sebagai desa yang rawan bencana yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan minimum luas lahan dan bangunan.

Untuk memperoleh persentase desa tangguh bencana maka digunakan rumus jumlah desa tidak tangguh bencana dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.21

Tabel persentasi desa rawan bencana

Kecamatan Kedu

Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah desa tangguh bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah desa rawan bencana | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber: Kecamatan Kedu Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas, cakupan desa tangguh bencana di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2015 sampai Triwulan IV Tahun 2020 masih 0%.

# **C . DASAR HUKUM TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP**

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu kepemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**D. SISTEMATIKA LKJIP**

**SISTIMATIKA PENYUSUNAN LKJIP PERANGKAT DAERAH**

**TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja PD (es 2 s/d 4 Th 2020)
2. IKPD Th 2020
3. Evaluasi Renja Tw 4 Th 2020
4. Prestasi Perangkat Daerah (tk Prov/nasional)
5. Rencana Aksi PD (contoh terlampir)

BAB I PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
2. Latar Belakang
3. Tugas Pokok dan Fungsi
4. Susunan Organisasi
5. Isu Strategis
6. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (Perangkat Daerah)
7. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP (diseragamkan dari ortala)
8. Dasar Hukum
9. Tujuan LKJIP
10. Manfaat LKJIP
11. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis (diseragamkan dr ortala)
2. VISI daerah
3. MISI daerah
4. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah
5. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
7. Rencana Anggaran Tahun 2020

BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (melihat tujuan dan sasaran PD)
3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja (faktor penghambat, faktor pendorong
4. AKUNTABILITAS KEUANGAN
5. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
6. Analisisa Efisiensi (membandingkan kinerja sasaran dengan keuangan, contoh terlampir)
7. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

1. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

BAB II2

**PERENCANAAN KINERJA**

**A. Rencana Strategis**

1. Visi

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah

“**TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG** **TENTREM, MAREM, GANDEM**”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tentrem** | : | | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. |
| **Marem** | : | Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata | | |
| **Gandem** | : | Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global. | | |

1. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

**Misi Pertama**, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**Misi Kedua,** Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**Misi Ketiga,** Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good* *governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintahsebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance.* Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas *(service excellence)*, yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1. Tujuan dan sasaran, kebijakan dan program perangkat daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jngka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengambarkan tercapaiannya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcame program.Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD tahun 208-2023 berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tabel.2.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | |  | | | **sasaran** |
| **Misi 3 ( tiga): Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas** | | | | | |
| **1** | **Terwujudnya penyelenggaraan pemeintah daerah yang berkualitas** | | **1.1** | **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah** | |
|  |  | | **1.2** | **Meningkatnya kualitas akuntabiltas kinerja pemerintah daerah** | |
|  |  | | **1.3** | **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** | |
|  |  | | **1.4** | **Terselenggaranya kegiatan pembangunan** | |

**B. Indikator Kinerja Perangkat daerah**

Indikator Kinerja Kecamatan KeduKabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Indikator Kinerja perangkat daerah Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** |
| 1. | Indek kepuasan mas (IKM ) di Kecamatanyarakat | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan menejemen pemerintah desa | Persentase kepemilikan KTP-EL |
|  |  | Pelanggaran disiplin perangkat desa | Persentase realisasipenerimaan PBB |
|  |  |  | Persentase tertib pengelolaan asset desa |
|  |  |  | Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu |
|  |  | Persentase penanganan laporan kejadian | Pendampingan desa binaan  Peningkatan ekonomi masyarakat  Perberdayaan dan kesejahteraan keluarga |
|  |  | Persentase Rumah Tidak layak Huni ( RTLH ) | Persentase Rumah Tidak layak huni ( RTLH ) |
|  |  |  | Persentase tempat ibadah kondisi baik |
|  |  | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu | Persentase desa yang menyelesaikan RKP desa tepat waktu |
|  |  |  | Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu |
| 2. | Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran | Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat | Peningkatan Kualitas pelayanan aparatur |

**C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2020, Dokumen RKPD Tahun 2020 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2020, serta dokumen APBD Tahun 2020. Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | | **Target 2020** | **Rumus** | **SUMBER DATA** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 7 | 8 |
| 1  a  b  c  d  e  2.    a.  3.  a.  b | *Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan menejemen pemerintahan*  Penerapan sangsi bagi pelanggaran disiplin    Meningkatkan sosialisasi pentingya pelaporan  Meningkatnya partisispasi bantuan RTLH  Meningkatnya kapasitas perangkat desa  Forum komunikasi Pimpinan Kecamatan  *Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian,evaluasi dan pengkajian pembangunan*  Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah  *Meningkatkan kualitas pelayanan adminstrasi perkantoran*  Pelayanan adminstrasi perkantoran  Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | a  b  c  d  e  a  a  b | Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan  Persentase penaganan laporan kejadian  Persentase Rumah Tidak layak huni ( RTLH )  Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu  Terlaksananya forum kominikasi pimpnan kecamatan  Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tepat waktu  Terlaksananya pelayanan aparatur pemerintahan kepada masyarakat  Terlaksananya pelayanan aparatur pemerintahan kepada masyarakat | 12 bln  12 bln  12 bln  12 bln  12 bln  32 dokumen  12 bln  12 bln | Jumlah perangkat yang melanggar dibagi jumlah perangkat  Jumlah desa yang melaporan dibagi jumlah desa  Jumlah RTLH yang ditangi dibagi jumlah RTLH  Jumlah desa yang menyelesaikan RKP desa Repat waktu dibagi jumlah desa  Jumlah dokumen yg dibuat di bagi dgn jumlah dokumen  Jumlah pelaksnaan dibagi jml bln | Kasi Tapem  Kasi Trantib  Kasi Kesmas  Kasi PMD  Kasi Trantib  Sekretariat  Sekretariat |

**D. Rencana Anggaran Tahun 2020**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tmanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan kedu Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 2.776.314.875,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.356.814.875,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 644.000.000,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020** | | | | | | |
| **PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  **Gaji perkantoran masuk ke pendukung** | | | | | | |
| **PD : KECAMATAN KEDU** | | |  | |  |  |
| No | Urusan/ BidangUrusanPemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | IndikatorKinerja Program/Kegiatan | RencanaKerjaTahun 2020 | | | |
| Target Kinerja | | Satuan | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | 7 | 8 |
|  | **BELANJA** | |  | |  | **2,119.816.296** |
|  | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | |  | |  | **2.356.814.875** |
| 1 | Gaji dan tunjangan |  | 14 | | bln | 1.712.814.875 |
| 2 | TPP |  | 14 | | bln | 644.000.000 |
|  | **BELANJA LANGSUNG** | | | |  | **756.650.000** |
| **I.** |  |  |  | |  | **195,500,000** |
| **A.** | **Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintah** | |  | |  | **88.500.000** |
| 1 | Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan | Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa,PATEN,pelayanan pendaftaran penduduk,dan penyelesaian sengketa tanah garapan,PPID,statistik sektoral,pelestarian koleksi naskah kuno | 14 | | ds | 13,000,000 |
| 2 | Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan | Prosentase pelunasan PBB tepat waktu | 14 | | desa | 75,500,000 |
| **B.** | **Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa** | |  | |  | **49.800,000** |
| 1 | Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | Meningkatnya kualitas/kuantitas kelembagaan Desa/Kelurahan.tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan,tersusunnya RKP desa,terlaksananya musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan,tersusunnya APBDes dan Perdes lainnya,Profil desa/Kelurahan pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan,fasilitas keuangan kepada desa,pemberdayaan masyarakat,bidang kesehatan melalui kelompok masyarakat,fisilitas kerja sama antar desa,pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukumadat,pemberdayaan oraganisasi pemuda,olehraga,d |  | |  | 37,800,000 |
| 2 | Fasilitasi dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa | Terlaksananya pembinaan dan tertib adminstrasi keuangan dan fasilitasi keuangan kepada desa |  | |  | 0 |
| 3 | Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) | Terlaksaanya fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | 12 | | bln | 12,000,000 |
| **C.** | **Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat** | |  | |  | **17.000,000** |
| 1 | Koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat | Terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat,pemberdayaan sosial,perlindungan jaminan sosial,perlindungan perempuan |  | |  | 13.000,000 |
| 2 | Pendampingan program barang bersubsidi | Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan | 12 | | bln | 0 |
| 3 | Koordinasi penanggulangan kemiskinan | Terlaksananya pendampingan program barang bersubsidi | 12 | | bln | 4,000,000 |
| **D.** | **Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | |  | |  | **19,200,000** |
| 1 | koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Terlaksananya koordinasi kesiapsiagaan bencana alam,meningkatnya keamanan,ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal | 12 | | bln | 5,000,000 |
| 2 | Forum Komunikasi kecamatan | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan | 12 | | bln | 7,000,000 |
| **II** | **FUNGSI PENUNJANG** | | | |  | **5.000,000** |
| **A.** | **Program perencanaan ,evaluasi,dan kelitbangan perangkat desa** | |  | |  | **5,000,000** |
| 1 | Penyusunan ,pelaporan dan perencanaan PD | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu | 32 | | Dokumen | 5,000,000 |
| **III** | **PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH** | | | | | **577.150.000** |
| **A.** | **Program pelayanan administrasi perkantoran** | |  |  | | **175.650.000** |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | 12 | bulan | | 20,500,000 |
| 2 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan | 12 | bulan | | 3,250,000 |
| 3 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12 | bulan | | 7.750,000 |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 | bulan | | 5,500,000 |
| 5 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 | bulan | | 2.500,000 |
| 6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | 12 | bulan | | 1,500,000 |
| 7 | Penyediaan makanan dan minuman | Terlaksananya penyediaan makan dan minum | 12 | bulan | | 16,000,000 |
| 8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan | 12 | bulan | | 27,500,000 |
| 9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | Terlaksaanya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 | bulan | | 30,000,000 |
| 10 | Jasa pelayanan perkantoran | Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran | 12 | bulan | | 18.000,000 |
| 11 | Penyediaan jasa pengaman gedung kantor | Terseedianya honor penjaga malam | 12 | bulan | | 43.400.000 |
| **B.** | **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | |  |  | | **396.500.000** |
| 1 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor,kursi pelayanan,meja kursi rapat,tangga | 3 | paket | | 10,000,000 |
| 2 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan kantor Kamera,Notebok | 2 | paket | | 15.000.000 |
| 3 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | Terlaksananya pembannguna tempat parkir | 1 | unit | | 330.000.000 |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung | Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor | 12 | bulan | | 15,000,000 |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional | 12 | bulan | | 21,000,000 |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 12 | bulan | | 3.000,000 |
| 7 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 | bulan | | 2.500,000 |
| **c** | **Program peningkatan disiplin aparatur** | |  |  | | **5.000.000** |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya | meningkatnya kualtas pelayanan kantor | 20 | potong | | 5.000.000 |

**E. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja**

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaaan Pembangunan Daerah
2. Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung.Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada Bagian yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



*Gambar 2.3 Sistem informasi Akuntansi daerah*

1. **SIAK** : Sistem Informasi Akuntasi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan

**keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan pada masing-masing Bagian sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.

*Gambar 2.2 Sistem perencanaan daerah*

1. **SIBANGDA** : Sistem pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh Bagian. Setiap Bagian wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.

1. **E-Bugeting** : Sistem Informasi penganggaran

Melalui aplikasi ini perencanaan anggaran semua kegiatan dapat di pantau secara online

**

*Gambar 2.4 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan daerah*

BAB 3

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajian Laporan Akuntablitas Kinerja Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangg Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2020 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasarn yang ditetapkan.

1. **Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedu yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

* + - 1. **Capaian indikator kinerja perangkat daerah**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **SKALA CAPAIAN KINERJA** | **KATEGORI** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 100 % | Memuaskan |
| 2 | 85,00% < capaian < 99,99% | Sangat baik |
| 3 | 70,00% < capaian < 85,00% | Baik |
| 4 | 55,00 % < capaian < 70,00 % | Cukup |
| 5 | Capaian < 55,00 % | Kurang |

PadaTahun 2020 , Kecamatan Kedu telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kecamatan KeduKabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2020. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan KeduKabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2013-2020 sebanyak 14 sasaran dan 24 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020. Pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Pencapaian Kinerja Sasaran**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Predikat | Jumlah Sasaran | Jumah Indikator Kinerja |
| 1 | Memuaskan | 0 | 8 |
| 2 | Sangat baik | 1 | 0 |
| 3 | Baik | 0 | 0 |
| 4 | Cukup | 0 | 0 |
| 5 | Kurang | 0 | 0 |
| Jumlah | | 1 | 8 |

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 1 sasaran dan 8 indikator dalam kategori sangat memuaskan. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagi berikut:

Tabel 3.3

**Pencapaian Sasaran**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Rata-rata capaian | Keterangan |
| 1 | Peningkatan Pengelolaan tata pemerintahan | 4 | 75 | baik |
| 2 | Koordinasi pengembangan potensi desa | 1 | 100 | Memuaskan |
| 3 | Peningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan | 1 | 100 | memuaskan |
| 4 | Koordinasi pemberdayaan pemerintahan desa/kelurahan | 4 | 100 | memuaskan |
| 5 | Fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) | 1 | 100 | memuaskan |
| 6 | Fasilitasi sana transfer dan bantuan keuangan kepada desa | 1 | 100 | memuaskan |
| 7 | Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga | 1 | 60 | memuaskan |
| 8 | Peningkatan kesejahteraan masyarakat | 3 | 90 | sangat baik |
| 9 | Koordinasi penanggulangan kemiskinan | 1 | 90 | sangat baik |
| 10 | Meningkatnya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 2 | 100 | memuaskan |
| 11 | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 1 | 100 | memuaskan |
| 12 | Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana | 1 | 100 | Memuaskan |
| 13 | Meningkatkan Forum kominikasi pimpinan kecamatan | 1 | 100 | memuaskan |
| 14 | Meningkatnya  Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan perangkat daerah | 1 | 100 | memuaskan |
|  |  |  |  |  |
| Jumlah | | 22 | 93,9 | Sangat baik |

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 14 sasaran dan 22 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedu tahun 2020 dapat tercapai 93,7 atau kategori **“sangat baik”.**

* + - 1. **Pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kecamatan Kedu, setidaknya terdapat 14 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada Tahun 2020, yaitu :

1. **Sasaran 1: Presentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 1

Pengukuran kinerja sasaran 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator sasaran | | satuan | capaian 2019 | Tahun 2020 | | capaian kinerja th 2020 | Renstra 2020-2023 | | capaian kinerja tahun 2020(%) |
|  |  | target | realisasi | Target akhir 2023 | realisasi 2020 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/3\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 |
| 1 | Persentase kepemilikan KTP-EL | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
| 2 | Persentase realisasi penerimaan PBB | bulan | 100 | 100 | 97 | 100 | 60 | 100 | 12 |
| 3333  3 | Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | rata-rata capaian kinerja |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |

Sumber perangkat daerah kec.Kedu tahun 2020

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 adalah 12 bulan, target Renstra 2020-2023 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan kepemikakan KTP-EL serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data penduduk;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Program Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan | | | |
|  | * Kegiatan * Kegiatan | :  : | Koordinasi pengelolaan tata pemerintahan  Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan  - |

1. **Sasaran 2: Persentase penanganan laporan kejadian**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2

Pengukuran kinerja sasaran 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator sasaran | | satuan | capaian 2019 | Tahun 2020 | | capaian kinerja th 2020 | Renstra 2020-2023 | | capaian kinerja tahun 2020(%) |
|  |  | target | realisasi | Target akhir 2023 | realisasi 2020 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/3\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 |
| 1 | Persentase penanganan laporan kejadian | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
| 2 | Persentase desa tangguh benacana | bulan | 100 | 100 | 97 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | rata-rata capaian kinerja |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |

Sumber perangkat daerah kec.Kedu tahun 2020

Analisis capaian kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 adalah 12 bulan, target Renstra 2020-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan , pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan sosial serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan penanganan bencana alam di 14 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Program Peningkatan kententraman dan ketertiban masyarakat | | | |
|  | * Kegiatan * kegiatan | :  : | Penanganan laporan kejadian  sosialisasi desa tangguh bencana |

1. **Sasaran 3 :Meningkatnya Bantuan Rumah tidak layak Huni (RTLH)**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3

Pengukuran kinerja sasaran 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator sasaran | | satuan | capaian 2019 | Tahun 2020 | | capaian kinerja th 2020 | Renstra 2020-2023 | | capaian kinerja tahun 2020(%) |
|  |  | target | realisasi | Target akhir 2023 | realisasi 2020 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/3\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 |
| 1 | Persentase Rumah tidak layak huni | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
| 2 | Persentase tempat ibadah kondisi baik | bulan | 100 | 100 | 97 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | rata-rata capaian kinerja |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |

Sumber perangkat daerah kec.Kedu tahun 2020

Analisis capaian kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 adalah 12 bulan, target Renstra 2020-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan , pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan sosial serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan penanganan bencana alam di 14 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Program Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa |

1. **Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas aparatur desa perangkat desa**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 4

Pengukuran kinerja sasaran 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator sasaran | | satuan | capaian 2019 | Tahun 2020 | | capaian kinerja th 2020 | Renstra 2020-2023 | | capaian kinerja tahun 2020(%) |
|  |  | target | realisasi | Target akhir 2023 | realisasi 2020 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/3\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 |
| 1 | Persentase desa yang menyelesaikan rkp desa tepat waktu | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
| 2 | Persentase desa yang menyelkesaikan APBDes tepar waktu | bulan | 100 | 100 | 97 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | rata-rata capaian kinerja |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |

Sumber perangkat daerah kec.Kedu tahun 2020

Analisis capaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 4 diukur dari 6 (enam) indikator yaitu Koordinasi pemberdayaan pemerintahan desa dengan target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, Fasilitasi dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa dengan target 12 bulan, realisasi 12 bulan, Pendampingan desa binaan dengan target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 1 desa, realisasi kinerja 1 desa, pada keenam indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi kinerja sampai Tahun 2020 dari keenam indikator yaitu

Terlaksananya Musrenbang adalah 12 bulan, target Renstra 2020-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, Pendampingan desa binaan adalah 5 desa, target Renstra 2020-2023 yang telah ditetapkan yaitu 5 desa, Fasiliatsi dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa adalah 60 bulan, target Renstra 2020-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, pada kelima indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %, Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif realisasi kinerjanya adalah 12 bulan, target Renstra 2020-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, sehingga menunjukkan capaian kinerja 100 %;

1. Keberhasilan kinerja keenam indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pendanaan dari APBD;
2. **Sasaran 5 : Meningkatnyakualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 5

Pengukuran kinerja sasaran 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator sasaran | | satuan | capaian 2019 | Tahun 2020 | | capaian kinerja th 2020 | Renstra 2020-2023 | | capaian kinerja tahun 2020(%) |
|  |  | target | realisasi | Target akhir 2023 | realisasi 2020 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/3\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 |
| 1 | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu | doku  men | 22 | 33 | 33 | 100 | 60 | 100 | 33 |
|  | rata-rata capaian kinerja |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |

Sumber perangkat daerah kec.Kedu tahun 2020

Analisis capaian kinerja sasaran 5 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 33 dokumen, realisasi kinerja 33 dokumen, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 naik yaitu mencapai 100 % Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 adalah 110 dokumen, target Renstra 2020-2023 yang telah ditetapkan yaitu 110 dokumen, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Perencanaan Pembangunan serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumber daya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu mewujudkan tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu;
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |

1. **Sasaran 6 :Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 6

Pengukuran kinerja sasaran 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator sasaran | | satuan | capaian 2019 | Tahun 2020 | | capaian kinerja th 2020 | Renstra 2020-2023 | | capaian kinerja tahun 2020(%) |
|  |  | target | realisasi | Target akhir 2023 | realisasi 2020 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/3\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 |
| 1 | Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Penyediaan jasa kebersihan | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Penyediaan Komponen listrik | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Penyediaan jasa pelayanan perkantoran | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Penyediaan jasa pengamanan gedung kantor | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Pengadaan peralatan gedung kantor | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Pemeliharaan rutin berkalan perlengkapan gedung kantor | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Pemeliharaan rutin berakala gedung kantor | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 12 |
|  | rata-rata capaian kinerja |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |

Sumber perangkat daerah kec.Kedu tahun 2020

Analisis capaian kinerja sasaran 18 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 6 diukur dari 18 (delapan belas ) indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan daerah, dengan target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan 12 bulan realisasi kinerja 12 bulan, Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (10 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Tersedianya secara rutin/berkala gedung kantor, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah, tersediaanya biaya perjalanan dinas dalam darah,Tresediaanya jasa pelayanan perkantoran,Tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan, dengan target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan adalah 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, meningkatnya kualitas aparatur dengan target kinerja 4 unit, realisasi kinerja 4 unit, meningkatnya kualitas aparatur dengan target kinerja 1 unit, realisasi kinerja 1 unit, pada kedua puluh indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 dari keduapuluh indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan, Tersedianya alat tulis kantor,tersedianya barang cetakan dan penggandaan,meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (9 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Terpeliharanyasecara rutin/berkala gedung kantor , meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 adalah sama-sama mencapai 100 %, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah,Tersediannya perjalanan dinas dalam daerah, meningkatnya kualitas aparatur (2 kegiatan),
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 dari kedua puluh indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan daerah adalah70desa, target Renstra 2020-2023 yang telah ditetapkan yaitu 70 desa,Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (9 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Terpeliharanyasecara rutin/berkala gedung kantor adalah 60 bulan, target Renstra 2020-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, dari 13 indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur adalah 60 bulan, target Renstra 2020-2023 yang telah ditetapkan 48 bulan sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 %, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah realisasi kinerja adalah 12 bulan, target Renstra 2020-2023 yang telah ditetapkan 60 bulan sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 %, , Tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan adalah - unit, target Renstra 2020-2023 yang telah ditetapkan 6 unit, sehingga capaian kinerja menunjukkan100 %, meningkatnya kualitas aparatur 12 bln, target Renstra 2020-2023 adalah 12 bln sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 % .
4. Keberhasilan kinerja keduapuluh indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada keduapuluh indikator tersebut mampumeningkatkan pencapaian target pendapatan daerah 14 desa.
6. Desa,mampu mewujudkan tersusunnya pelaporan akhir tahun, mampu meningkatkan kualitas pelayanan aparatur, mampu memelihara sarana dan prasarana aparatur selama 12 bulan dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur 48 unit.
7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian keduapuluh indikator diatas adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| a. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
|  | * Kegiatan | : | 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 5. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor; 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 7. Penyediaan makanan dan minuman; 8. Jasa Pelayanan Perkantoran 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11. Jasa pengamanan gedung kantor 12. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor |
| c. | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | |
|  | * Kegiatan | : | 1. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor; 3. Pengadaan peralatan gedung kantor; 4. Pengadaan sarana dan prasaran pendukung gedung kantor; 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; |

### Akuntanbilitas keuangan

1. **AKUTANBILITAS KEUANGAN**

### **Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tahun Anggaran 2020, di dukung dengan Anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.119.816.296,-

Adapun alokasi dana tersebut dipergunakan antara lain :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 1.635.042.243,-
3. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 45.515.000,-

1. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 7.761.664,-
2. Belanja Modal, sebesar Rp. 188.443.873,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020** | | | |
|  | **Per 31 Desember 2020** | | | |
|  |  |  |  |  |
| No. | **Program kegaiatan** | **Pagu anggaran (Rp.)** | **Realisasi** | **(%)** |
| **anggaran (Rp.)** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
|  | BELANJA LANGSUNG | 395,329,500.00 | 369,109,039.00 | 93.37 |
| **1** | **Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan** | **44.119.650,00** | **44.119.650,00** | **100** |
|  | a. Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan | 4.219.650,00 | 4.219.650,00 | 100 |
|  | b. Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan | 39.900.000,00 | 39.900.000,00 | 100.00 |
| **2** | **Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan** | **17.948.300,00** | **38,692,150.00** | **99.88** |
|  | a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan | 15.648.300.00 | 15.573.800.00 | 99.95 |
|  | b. Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa | 0.00 | 0.00 | 99.32 |
|  | c. Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) | 2.300.000.00 | 2.300.000.00 | 100.00 |
| **3** | **Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan** | **2.540.000.00** | **2.540.000.00** | **97,5** |
|  | a. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  | b. Koordinasi Penangulangan kemiskinan | 2.540.000.00 | 2.540.000.00 | 97.5 |
|  | c. Pendampingan program barang bersubsidi | 0.00 | 0.00 | 0 |
| **4** | **Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan** | **27.200.000.00** | **27.100.000.00** | **99.70** |
|  | a. Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | b. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) | 27.200,000.00 | 27,200,000.00 | 99,70 |
| **5** | **Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah** | **2,500.400.00** | **2.500.400.00** | **100** |
|  | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan | 2,500.400.00 | 2,500..400.00 | 100 |
| **6** | **Program pelayanan adminsitrasi perkantoran** | **125.540.272.00** | **108.794.575.00** | **86.6** |
|  | 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 9.105.000.00 | 6.739.366.00 | 75 |
| No. | **Program kegaiatan** | **Pagu anggaran (Rp.)** | **Realisasi** | **(%)** |
| **anggaran (Rp.)** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
|  | b. Penyediaan jasa kebersihan kantor | 2,054.600.00 | 2,054.600.00 | 100.00 |
|  | c. Penyediaan alat tulis kantor | 6.690.200.00 | 6.690.200.00 | 100.00 |
|  | d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 4.976.000.00 | 4.976.000.00 | 100.00 |
|  | e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1.499.700.00 | 1.499.700.00 | 100.00 |
|  | f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 100.00 |
|  | g. Belanja Surat Kabar/Majalah | 1,320,000.00 | 1,310,000.00 | 99.24 |
|  | h. Penyediaan makanan dan minuman | 9.094,000.00 | 8.457.000.00 | 93 |
|  | i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 24.500.000,00 | 24.500.000.00 | 100,00 |
|  | j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.693.000,00 | 1.063.000.00 | 9,94 |
|  | k. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran | 16.031.596.00 | 15.734.549.00 | 99,15 |
|  | 1. Penyediaan jasa pengaman kantor | 39.576.176,00 | 35.760.160,00 | 90,36 |
| **7** | **Program peningkatan sarana prasarana aparatur** | **217.537.500.00** | **215.410.623.00** | **99.02** |
|  | a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | b. Pengadaan peralatan gedung kantor | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  | c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | 190.000.000.00 | 188.443.873.00 | 99.18 |
|  | d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 16.784.300.00 | 16.213.550.00 | 96.60 |
|  | e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 1.500.000.00 | 1.500.000.00 | 100.00 |
|  | f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 1.575.200.00 | 1.575.200.00 | 100 |
|  | g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 7.678.000.00 | 7.678.000.00 | 100 |
|  | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **1.678.930.174,00** | **1.635.042.243,00** | **97,39** |
|  | BELANJA PEGAWAI | 1,901,998,149.00 | 1,789,762,907.00 | 94.10 |
|  | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.095.046.986.00 | 1.074.327.842.00 | 95.40 |
|  | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 583.883.188.00 | 560.714.401.00 | 96.76 |
|  | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 583.883.188.00 | 560.714.401.00 | 96.76 |
|  | **JUMLAH** | **2.119.816.296,00** | **2.056.806.291.00** | **97,03** |
|  |  |  |  |  |

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2020, apabila dibandingkan tahun 2019 maka terjadi kenaikan sebesar 0,97 %, Tahun 2020 sebesar 97,03 %, tahun 2020 sebesar 93,97 %.

* + - 1. **Analisis Efisiensi**

Pada tahun 2020, Kecamatan Kedu telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Rencana Strategis Kecamatan Kedu, terdapat 14 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerjayang harus diwujudkan pada tahun 2020, yaitu :

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Kedu pada Tahun 2020 sebagai sarana penunjang untuk mencapai sasaran sesuai target dengan hasil yang optimal adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan, dengan kegiatan:

* Koordinasi pengelolaan tata pemerintahanPersentase kepemilikan KTP-EL, persentase tertib pengelolaan asset desa,persentase desa yang mentelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu., dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 4.219.650,-
* Koordinasi pengemebangan potensi desa/kelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 39.900.000,-

1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan desa di Kecamatan, meliputi kegiatan :

* Peningkatan Koordinasi pemberdayaan pemerinatah desa/kelurahan dengan aloksi dana APBD sebesar Rp.15.648.300,-
* Meningkatnya bantuan keuangan kepada desa, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 0,-
* Fasilitasi pemberdayaan keluarga/PKK dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.300.000,-

1. Program Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan dengan kegiatan:

* Koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 0,-
* Koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.2.540.000,-
* Pendampingan barang bersubsidi dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 0,-

1. Program Peningkatan kententraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan, dengan kegiatan :

* Koordinasi ketentraman dan kertertiban umum, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 0,-
* Forum Komunikasi pimpinan kecamatan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 27.200.000,-

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

* Penyusunan dan pelaporan 2.500.400,-

Untuk mewujutkan tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

* Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 9.105.000,-
* Pelayanan jasa kebersihan kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.054.600,-
* Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 6.690.200,-
* Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 4.976.000,-
* Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.449.700,-
* Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.320.000,-
* Penyediaan makanan dan minuman, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 9.094.000,-
* Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 24.500.000,-
* Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 10.693.000,-
* Jasa pelayana perkontoran , dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 16.031.596,-
* Penyediaan jasa pengaman gedung kantor. Demngan alokasi dana APBD sebesar Rp. 39.576.176,-

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparatur selama 12 bulan;

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :

* Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.0,-
* Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.0,-
* Pengadaan sarana dan prasaran pendukung gedung kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 190.000.000,-
* Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor , dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.7.678.000,-
* Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas dengan alokasi dada APBD sbesar Rp. 0,-
* Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 16.784.300,-
* Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.500.000,-
* Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.575.200,-

1. Program peningkatan disiplin aparatur, meliputi kegiatan :

* Pengadaan pakaian dina beserta perlengkapannya, dengan alokasi dana APBDsebsar Rp. 3.500.000,-

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 5 sasaran menunjukan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 3 ( tiga) sasaran dan ada 2 (dua) sasaran yang mencapai di bawah 100 % yaitu sasaran 2 mencapai 99,16 % dan sasaran 4 mencapai 99 % keberhasilan dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Anggaran di program dan kegiatan banyak yang ter Refokusing untuk penanganan Covid – 19 akan tetapi kegiatan tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan target dan rencana.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategis | Persentase Realisasi Anggaran | Persentase | Tingkat Efisiensi |
| Realisasi Kinerja | (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan | 100 | 100 | 100 |
| 2 | peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan | 100 | 100 | 100 |
| 3 | peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamata | 100 | 100 | 100 |
| 4 | peningkatan kesejahteraan masyarakat | 100 | 100 | 100 |
| 5 | peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan | 100 | 100 | 100 |

BAB IV

**PENUTUP**

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan KeduKabupaten Temanggung Tahun 2020dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan KeduKabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 14 (empat belas) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten TemanggungTahun 2015-2020.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 14(empat belas) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 4 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan, 6 sasaran di atas 90 % dikategorikan sangat baik. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 14 sasaran dan 24 (dua puluh empat) indikator dikategorikan sangat baik (96,4 %). Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori kurang sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 14 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kedu 2020-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Kedu, Februari 2021

C A M A T KEDU

Drs. FAJAR PRAMUDITO.MM

Pembina Tk I

NIP. 19630325 199203 1004